

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial sebagai *social welfare* merupakan ukuran yang sangat krusial untuk mengukur seberapa sebuah negara bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar dan hak-hak yang harus dihormati setiap orang dalam satu masyarakat. Di Indonesia, pencapaian kesejahteraan sosial selalu dipandang sebagai hal yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas oleh pemerintah, dengan fokus memperbaiki kondisi kehidupan yang lebih adil dan merata secara inklusif di berbagai domain kehidupan, pekerja, pendidik, kebidanan, perumahan, sosialisasi dan lainnya. Hal itu diinginkan untuk memperkecil kesenjangan sosial yang ada dan memberikan kesempatan lebih banyak bagi setiap penduduk untuk hidup dengan baik.

Friedlender (dalam Fahrudin, 2014), menjelaskan bahwa *social welfare* dapat dipahami sebagai suatu sistem terencana dan terorganisasi yang di dalamnya ada pelayanan sosial dan lembaga yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok supaya mendapat penghidupan yang minimal layak dan sehat. Sistem tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan hubungan sosial dan personal yang sehat, yang kemudian dapat memungkinkan mereka mengembangkan potensi dirinya dan dalam kehidupan keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan sosial juga sangat berpengaruh untuk menantu kehidupan sosial dan pemenuhan hak atas dasar kehidupan.

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama memfasilitasi pemulihan fungsi sosial individu dan kelompok dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu

fokus utama dari pelayanan kesejahteraan sosial adalah memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang membutuhkan bantuan, memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati haknya sebagai warga negara yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan sosial sendiri diutamakan dalam memenuhi hak dan keberfungsian dari penerima manfaat yang mendapatkan layanan sosial dari kinerja pekerja sosial yang menjalankan tugas dan fungsi di berbagai lembaga kesejahteraan sosial.

Kinerja mengungkapkan banyak informasi mengenai baik atau buruk proses kerja seorang karyawan berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kasmir (2016) menyatakan bahwa kinerja mencakup hasil kerja serta perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditunjukkan oleh individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam jangka waktu tertentu. Kerangka waktu yang paling umum untuk evaluasi kinerja biasanya adalah satu tahun hal ini bisa membantu menentukan seberapa efektif pencapaian standar yang telah ditetapkan. Mereka yang berhasil mencapai target tersebut biasanya dianggap berkinerja baik. Di sisi lain, tingkat kinerja mereka yang tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan akan dievaluasi sebagai buruk atau tidak memuaskan.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang memberikan bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pada bagian keempat menyatakan bahwa praktik pekerjaan sosial mencakup bidang-bidang seperti pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan

pengembangan sosial. Hal tersebut menjadikan pekerjaan sosial sebagai salah satu bentuk layanan dalam rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan, pengawasan, dan rehabilitasi, termasuk anak-anak yang merupakan korban kekerasan untuk mendapatkan fasilitasi pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Pekerja sosial memainkan peran penting dalam memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, sehingga mereka dapat pulih baik secara psikologis maupun sosial. Salah satu tugas utama pekerja sosial adalah membantu anak korban kekerasan dengan memberikan dukungan emosional dan psikologis, konseling, dan layanan rujukan yang relevan. Pekerja sosial juga membantu anak untuk mengungkapkan diri dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan serta menyiapkan laporan sosial untuk proses rehabilitasi mereka. Pekerja sosial berfokus pada anak dalam memberikan perlindungan, serta memastikan anak korban kekerasan mendapatkan pendampingan yang sesuai dan yang mendukung proses pemulihan anak.

Data yang didapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam terdapat 218 anak korban kekerasan selama tahun 2024 yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Batam. Jumlah tersebut terdiri atas kekerasan seksual 150 kasus, kekerasan fisik 35 kasus, kekerasan psikis 4 kasus, perdagangan anak (*trafficking*) 1 kasus, penelantaran anak 2 kasus, dan kategori lain 26 kasus. Sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran terhadap kekerasan pada anak yang cukup banyak terjadi di tahun 2024. Maka dari itu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak dalam menangani anak korban

kekerasan di Kota Batam terutama pekerja sosial profesional di UPTD PPA Kota Batam.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam hal ini peneliti mengambil UPTD PPA yang berada di Kota Batam. Melihat dari jumlah kasus anak korban kekerasan di tahun 2024 yang sangat banyak menjadi salah satu alasan pengambilan Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. UPTD PPA memiliki pekerja sosial yang bertugas untuk memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di Kota Batam. Pekerja sosial di UPTD PPA merupakan pekerja sosial yang sudah profesional dan memiliki pengalaman yang banyak dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan.

Pekerja sosial profesional yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam berjumlah 4 orang. Pekerja sosial memiliki jenjang jabatan fungsional pekerja sosial sesuai kategori keahliannya. Jenjang jabatan tersebut terdiri atas pekerja sosial ahli pertama, pekerja sosial ahli muda, pekerja sosial ahli madya, dan pekerja sosial ahli utama. Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam terdiri atas 4 orang pekerja sosial ahli pertama.

Jumlah pekerja sosial di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam berjumlah 4 orang dalam

memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan di Kota Batam. Melihat jumlah anak korban kekerasan di Kota Batam yang cukup banyak yakni 218 kasus, membuat pekerja sosial harus kerja ekstra dalam memberikan pendampingan. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pekerja sosial dalam menjalankan kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.

Ketidakseimbangan jumlah pekerja sosial dengan penanganan kasus anak korban kekerasan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas atau hasil yang ditangani oleh pekerja sosial di UPTD PPA Kota Batam. Pekerja sosial di UPTD Kota Batam ini tidak hanya menangani anak korban kekerasan tetapi juga menangani Perempuan-perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Sehingga dalam proses penanganan dan pendampingan kepada klien dalam hal ini anak dan Perempuan korban kekerasan menjadi lebih banyak. Hal tersebut mengakibatkan efektivitas penggunaan waktu dalam pendampingan anak korban kekerasan.

Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan di UPTD Kota Batam tidak seperti di Sentra atau Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya yang memberikan pendampingan dan layanan dalam kurun waktu yang cukup lama. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan oleh pekerja sosial cukup singkat. Hal tersebut dikarenakan anak korban kekerasan tersebut tidak tinggal atau menetap di asrama seperti di beberapa Sentra ataupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan.

Pekerja sosial di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam mengungkapkan bahwa kinerja dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan membutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu yang cukup ekstra. Melihat jumlah pekerja sosial di UPTD PPA Kota Batam yang sedikit ketika harus melakukan pendampingan yang membuat pekerja sosial kewalahan. Akibat dari hal itu terkadang kinerja pekerja sosial dalam pendampingan menjadi kurang maksimal dan masih banyak yang harus dievaluasi untuk bisa menjadi lebih baik kedepannya. Melalui evaluasi kinerja ini juga membuat pekerja sosial di UPTD PPA Kota Batam bisa meningkatkan kinerjanya sehingga bisa maksimal dalam melakukan pendampingan kepada anak korban tindak kekerasan.

Penilaian kinerja pekerja sosial sangat penting, karena penilaian kinerja merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Dilaksanakannya penilaian kinerja ini agar dapat mengukur dan menilai sejauh mana pekerja sosial mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja pekerja sosial terutama di UPTD PPA Kota Batam. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi tersebut pekerja sosial di UPTD PPA Kota Batam bisa melihat dari aspek mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Annisa Kamaliya (2024) tentang Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak di Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota

Bandung menggambarkan bahwa terdapat kekurangan dalam aspek komunikasi dan kemampuan serta kurangnya kolaborasi dengan *stakeholder* lain. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai aspek penelitian, metode, dan pendekatan penelitian serta terdapat perbedaan mengenai sasaran penelitian. Selanjutnya penelitian terdahulu yang ditulis oleh Adinda Putri Rahayu (2023) tentang Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi masih terdapat banyak kekurangan serta permasalahan yang timbul terkait keterbatasan waktu pendampingan, kurangnya inisiatif dalam pendampingan, dan lemahnya kolaborasi pekerja sosial dengan profesi lain dalam proses pendampingan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai aspek penelitian, metode, dan pendekatan penelitian.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nussy Fauziah Sar (2022) tentang Kinerja Pekerja Dinas Sosial dalam Peningkatan Kebutuhan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pekanbaru menunjukkan hasil bahwa aspek kuantitas, kualitas, tanggung jawab, dan kerja sama sudah baik tetapi terkait dengan kualitas SDM harus ditingkatkan agar sesuai dengan tugas dan fungsi pekerja dinas sosial. Penelitian ini memiliki perbedaan terkait dengan sasaran penelitian dan aspek-aspek penelitian dari penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya penelitian terdahulu yang ditulis oleh Arista Yuli Astuti (2021) tentang Kinerja Pekerja Sosial di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Dinas Sosial Kota Bandung menunjukkan hasil sudah cukup baik terkait

dengan aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Penelitian ini memiliki perbedaan terkait dengan metode dan pendekatan yang digunakan serta sasaran penelitian, walaupun terdapat kesamaan dari aspek-aspek penelitian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, belum terdapat penelitian tentang kinerja pekerja sosial terutama dalam pendampingan anak korban kekerasan. Peneliti juga melihat belum adanya penelitian tentang kinerja pekerja sosial di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam. Sehingga peneliti ingin mengetahui kinerja pekerja sosial dari perspektif pekerja sosial sendiri dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan.

Uraian pada latar belakang, mendasari minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam”. Peneliti ingin melihat kinerja pekerja sosial dari aspek-aspek kinerja tersebut. Aspek tersebut adalah aspek kualitas kerja, aspek ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi pekerja sosial pada pendampingan anak korban kekerasan.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam”, perumusan masalah dirinci dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana kualitas kerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan?
3. Bagaimana ketepatan waktu pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan?
4. Bagaimana inisiatif pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan?
5. Bagaimana kemampuan kerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan?
6. Bagaimana komunikasi pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai “Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam” dengan menjawab sub-sub pertanyaan yang diajukan yaitu untuk mengetahui:

1. Karakteristik informan.
2. Kualitas kerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.
3. Ketepatan waktu pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.
4. Inisiatif pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.
5. Kemampuan kerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.
6. Komunikasi pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah praktik pekerjaan sosial khususnya tentang kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan praktik pekerja sosial khususnya menjadi referensi untuk memperdalam pengetahuan mengenai kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penelitian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang teori yang relevan dengan penelitian yang terdiri dari tinjauan tentang konsep kinerja, tinjauan tentang konsep anak, tinjauan tentang konsep anak korban kekerasan, tinjauan tentang konsep kinerja, dan tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak korban kekerasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data, cara menemukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang simpulan dan saran.